



Evaluasi Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga

Lucyana Virgi Sonia Limbong¹⁾; Tunggul Sihombing²⁾

¹⁾ Student of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra

²⁾ Lecturer of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra

Email: ¹⁾ lucyanavirgi11@gmail.com; ²⁾ tlumbantoruan@yahoo.co.id

ARTICLE HISTORY

Received [11 November 2022]

Revised [30 November 2022]

Accepted [15 Desember 2022]

KEYWORDS

Evaluation, Indonesian Movement Aware of Administration (GISA), Program.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Evaluasi program adalah suatu kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi yang mengimplementasi suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang untuk pengambilan keputusan. Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang dilaksanakan. Berdasarkan Instruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Administrasi Kependudukan dengan tujuan utama dari gerakan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bidang administrasi kependudukan menuju masyarakat yang tertib, pemerintah yang efektif dan efisien serta negara yang memiliki daya saing. Terkait program GISA di Kota Sibolga ditemukan bahwa masih ada masyarakat yang belum tertib administrasi kependudukan, targetan program GISA belum mengetahui tujuan program, program yang dilakukan belum tepat sasaran pada masyarakat serta tidak meningkatnya kepemilikan dokumen dari tahun 2019 sampai pada tahun 2020 pada administrasi kepemilikan KIA. Untuk itu pada penelitian ini akan mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci evaluasi Program GISA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan evaluasi program GISA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga. Data yang diperoleh dilakukan analisis secara kualitatif dengan menelaah seluruh data yang terkumpul, mempelajari data, dan menyusun data yang diperoleh dengan pendekatan yang dikemukakan oleh D. Stufflebeam menggunakan model evaluasi CIPP yaitu, *Context, Input, Process* dan *Product*. Melalui penelitian ini diketahui bahwa evaluasi program GISA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga pada dimensi *context* program GISA dapat ditemukan bahwa masih ada masyarakat yang belum sadar pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan sehingga kebutuhan yang diperlukan tidak terpenuhi. Dimensi *Input* evaluasi program GISA yang ditemukan adalah sarana dan prasarana kurang maksimal untuk memenuhi terlaksananya program GISA ini, sehingga pelaksanaan teknis pembentukan dokumen kurang terlaksana dengan baik. Pada dimensi *Proces* masih ada masyarakat yang tidak mengetahui program GISA tentang arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan serta jadwal kegiatan kurang terlaksana dengan baik karena adanya pandemi Covid-19. Dimensi *Product* yang ditemukan pengaruh program ini belum tersampaikan kepada msasyarakat secara menyeluruh.

ABSTRACT

Program evaluation is a unit of activity that aims to collect information that implements a policy, takes place in a continuous process, and occurs in an organization that involves a group of people for decision making. Program evaluation aims to determine the achievement of program objectives implemented. Based on the Instruction of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 470/837/SJ concerning the Population Administration Movement, the main objective of this movement is to increase public awareness in the field of population administration towards an orderly society, an effective and efficient government and a competitive state. Regarding the GISA program in Sibolga City, it was found that there were still people who did not have an orderly population administration, the target of the GISA program did not know the program's objectives, the programs carried out were not targeted at the community and there was no increase in document ownership from 2019 to 2020 in the administration of KIA ownership. For this reason, this study will identify and describe in detail the evaluation of the GISA Program at the Population and Civil Registration Office of Sibolga City. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques used are interviews, observations and documentation related to the evaluation of the GISA program at the Population and Civil Registration Office of Sibolga City. The data obtained were analyzed qualitatively by examining all the collected data, studying the data, and compiling the data obtained using the approach proposed by D. Stufflebeam using the CIPP evaluation model, namely, *Context, Input, Process* and *Product*. Through this research, it is known that the evaluation of the GISA

program at the Population and Civil Registration Office of Sibolga City on the context dimension of the GISA program can be found that there are still people who are not aware of the importance of ownership of population documents so that the necessary needs are not met. The input dimension for the evaluation of the GISA program found was that the facilities and infrastructure were not optimal enough to fulfill the implementation of the GISA program, so that the technical implementation of document formation was not carried out properly. In the Process dimension, there are still people who do not know the GISA program about the importance of ownership of population documents and the schedule of activities is not carried out properly due to the Covid-19 pandemic. The Product Dimensions found to have the effect of this program have not been conveyed to the community as a whole.

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Implementasi kebijakan tersebut salah satunya Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan atau disingkat GISA adalah sebuah gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar pentingnya administrasi kependudukan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar dibidang administrasi kependudukan serta dasar hukum dari Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan atau GISA. Tujuan utama dari gerakan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dibidang administrasi kependudukan menuju pada masyarakat yang tertib, pemerintahan yang efektif dan efisien serta negara yang memiliki daya saing. Target dari program GISA yaitu masyarakat, aparatur petugas pelayanan admindukcapil, lembaga pengguna (pemerintah dan swasta) serta diterapkan mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, dan berpuncak di tingkat nasional.

GISA merupakan aksi untuk meningkatkan ekosistem pemerintahan yang sadar terhadap pentingnya dokumen kependudukan. GISA dilaksanakan dengan 4 Program yaitu, Program Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan, Program Sadar Pemutakhiran Data Penduduk, Program Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan dan Program Sadar Melayani Administrasi Kependudukan dengan launching GISA. Hal ini diharapkan untuk terbangunnya ekosistem pemerintahan dan masyarakat yang sadar tentang pentingnya administrasi kependudukan. GISA diterapkan untuk mewujudkan provinsi paling sedikit satu kabupaten/kota sebagai kabupaten/kota sadar administrasi kependudukan, kabupaten/kota mewujudkan paling sedikit satu kecamatan sebagai kecamatan sadar administrasi kependudukan, dan kecamatan mewujudkan paling sedikit satu desa/kelurahan sadar administrasi kependudukan. Puncak akhir dari GISA adalah terwujudnya Indonesia yang sadar administrasi kependudukan, sehingga terwujud tertib administrasi kependudukan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. (Sumber: disdukcapil.sumutprov.go.id)

Walikota Sibolga canangkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) Kota Sibolga Tahun 2019 di Rusunawa Jalan Merpati Kota Sibolga. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua TP. PKK. Kota Sibolga Delmeria Sikumbang sekaligus anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Forkopimda Kota Sibolga, para pimpinan OPD Kota Sibolga, camat dan lurah se-kota Sibolga, serta para masyarakat rusunawa. Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk dalam sambutan mengatakan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dibidang administrasi kependudukan menuju masyarakat yang tertib, pemerintahan yang efektif dan efisien, maka pemerintah saat ini mencanangkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).

Pencanangan program ini diharapkan dapat melayani dan mewujudkan administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia. Peserta yang diundang dalam acara ini sebanyak 1.000 (seribu) orang yang berasal dari unsur masyarakat setiap kelurahan se-Kota Sibolga, perwakilan dari sekolah penerima KTP-EL dan KIA, perwakilan dari kampung KB, masyarakat penerima KK, surat pindah, dan akta pencatatan sipil. Program GISA ini mewajibkan semua warga negara untuk melengkapi dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan yang harus dilengkapi antara lain adalah KTP- el, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, akta perceraian, akta perkawinan dan lain-lain. Oleh karena itu, evaluasi program GISA ini dilakukan untuk dapat melihat efektif dan efesiansinya program GISA serta dapat menginformasikan keputusan mengenai pengembangan program GISA dimasa depan. Kartu keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota



keluarganya. Kepemilikan kartu keluarga di Kota Sibolga dihitung berdasarkan kepemilikan kartu keluarga yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pada tahun 2019 dari 24.874 kepala keluarga yang terdaftar *database* kependudukan, yang memiliki kartu keluarga sebanyak 24.437 (98,24%), sedangkan kepala keluarga yang belum memiliki KK sebanyak 437 kepala keluarga (1,76%). Jika pada tahun 2020 dari 25.933 kepala keluarga terdaftar yang memiliki KK sebanyak 25.563 (98,57%) sedangkan kepala keluarga yang belum memiliki KK sebanyak 370 kepala keluarga (1,43%). Berdasarkan hasil pra-penelitian kepala keluarga yang belum memperoleh KK ini disebabkan karena perpindahan penduduk, data baru, pisah KK karena menikah dan perubahan kepala keluarga karena pindah atau meninggal dunia. (*Sumber*: Data Perkembangan kependudukan Kota Sibolga Tahun 2019 dan Tahun 2020)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi *chip* sebagai identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2019 perekaman KTP-el di Kota Sibolga mencapai jumlah sebanyak 62.871 (99,332%) dari jumlah wajib KTP sebanyak 63.306 jiwa. Sementara, wajib KTP yang belum melakukan perekaman masih ada sebanyak 435 jiwa (0,69%). Pada tahun 2020 jumlah wajib KTP sebanyak 65.212 jiwa. Paling banyak melakukan perekaman KTP-el adalah kelompok umur 17-19 tahun sebanyak 3.248 jiwa. Hal ini didorong oleh pelaksanaan pilkada Kota Sibolga tahun 2020 sebagai syarat hak pilih. (*Sumber*: Data Perkembangan kependudukan Kota Sibolga Tahun 2019 dan Tahun 2020)

Kartu Identitas Anak di Kota Sibolga dimulai pada tahun 2017 sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak adalah untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. Kepemilikan KIA tahun 2019 sudah hampir anak usia 0-17 tahun, yaitu dari 29.743 anak yang telah memiliki KIA sebanyak 13.546 anak (45,54%). Dengan demikian masih lebih dari setengah anak di Kota Sibolga belum memiliki KIA, yaitu sebanyak 16.197 anak (54,46%). kepemilikan KIA pada tahun 2020 kasus yang belum memiliki KIA sama dengan data pada tahun 2019. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 tidak ada kenaikan kepemilikan KIA di Kota Sibolga. (*Sumber*: Data Perkembangan kependudukan Kota Sibolga Tahun 2019 dan Tahun 2020)

Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Pada tahun 2019 jumlah anak yang memiliki akta kelahiran sebanyak 30.809 (93,69%) sedangkan yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 2.075 (6,31%). Tingkat kepemilikan akta kelahiran dikalangan anak usia 0-18 tahun merupakan salah satu indikator penetapan kabupaten/kota untuk melaksanakan program nasional Kartu Identitas Anak (KIA). program ini akan mendorong animo masyarakat untuk mengurus akta kelahiran. (*Sumber*: Data Perkembangan kependudukan Kota Sibolga Tahun 2019 dan Tahun 2020)

Untuk hasil evaluasimeta yang sudah dilakukan berdasarkan empat standar tersebut menunjukkan hasil yang terbaik. Adapun hasil yang ditunjukkan yaitu untuk *Utility Standard* mendapatkan skors sebesar 27 atau 96%, *feasibility standards* mendapatkan skors sebesar 11 atau 92%, *propriety standards* mendapatkan skors sebesar 30 atau 93%, *accuracy standards* mendapatkan skors sebesar 45 atau 93%. Berdasarkan jumlah standar di atas jumlah total menggunakan standar evaluasimeta sebesar 114 atau 95%.

Pada *input evaluation*, menganalisis dan mendeskripsikan sumber daya manusia dan sumber daya material yang tersedia untuk relevansi kemungkinan kegiatan dapat dilaksanakan. Pada *process evaluation*, memonitoring setiap aktivitas yang berpotensi terdapat tantangan secara prosedural dan memberikan tanda untuk informasi yang spesifik untuk memutuskan suatu program yang aktual. *Product evaluation*, mengukur kriteria dengan objektif dan membandingkan hasil pengukuran dengan standar sebelum dilakukannya antisipasi. Adanya kepemilikan dokumen kependudukan, penduduk dapat mengakses program dari pemerintah, seperti bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

LANDASAN TEORI

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tindakan oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk menggapai tujuan sebagaimana diformulasikan dalam kebijakan yang sangat berkaitan dengan sistem, prosedur serta mekanisme, dan keahlian para pejabat publik di dalam menterjemahkan serta mempraktikkan kebijakan publik untuk mencapai sasaran yang ditentukan. Sebagaimana diikuti dari Rasyid (dalam Alexander 2019: 24) bahwa "Implementasi dari setiap kebijakan itu adalah birokrasi dan justru dalam implementasi itulah sesungguhnya suatu kebijakan diberi bentuk".

Sementara itu, Van Mater dan Horn (dalam Alexander 2019:26) memberi pengertian terkait implementasi kebijakan yaitu “Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau swasta, baik secara individu maupun kelompok, yang diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana diformulasikan dalam kebijakan tersebut.” Berdasarkan pernyataan di atas bahwa Van Mater dan Horn memandang sebuah kebijakan bukan saja dirumuskan oleh pemerintah namun, pihak lain pun (swasta) sesuai dengan kepentingan organisasi dapat membuat dan mengimplementasikan kebijakan itu kepada masing-masing kelompok sasaran baik individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan dari kebijakan organisasinya.

Evaluasi Program

Menurut Arikunto (2009: 1) mendefinisikan bahwa: “Evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu; dalam mencari sesuatu tersebut, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.” Evaluasi program adalah pengumpulan informasi yang sistematis mengenai kegiatan, karakteristik, dan hasil dari program untuk membuat penilaian mengenai program ini, meningkatkan efektivitas program, dan atau menginformasikan keputusan mengenai pengembangan program di masa depan. Evaluasi program yang dijalankan harus bersifat komprehensif dari berbagai aspek yang berguna untuk menentukan keputusan pada program yang sedang dijalankan.

Model Evaluasi Program yang Digunakan

Ada banyak model evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli yang dapat dipakai dalam mengevaluasi program. Model evaluasi program yang digunakan peneliti adalah model evaluasi Stufflebeam’s Model (CIPP Model). Model ini dikembangkan oleh Stufflebeam, model CIPP yang merupakan sebuah singkatan dari huruf awal empat buah kata, yaitu *Context, Input, Process, and Product*. Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan.

Berikut penjelasan CIPP yang dapat dijadikan pedoman kerja oleh administrator untuk melayani ada empat macam yaitu:

a. *Context Evaluation* (Evaluasi Konteks)

Evaluasi konteks membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program (Tayibnapi, 2000:14). Tujuan evaluasi konteks yang utama adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Dengan demikian untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan ini, evaluator akan dapat memberikan arah perbaikan yang diperlukan. Evaluasi konteks juga terkait dengan upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek (Arikunto dan Jabar, 2009:48).

b. *Input Evaluation* (Evaluasi Masukan)

Evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Pertanyaan yang berkenaan dengan masukan mengarah pada pemecahan masalah yang mendorong diselenggarakannya program yang bersangkutan. Oleh karena itu, komponen evaluasi masukan meliputi: (1) sumber daya manusia, (2) sarana dan peralatan pendukung, (3) dana atau anggaran, dan (4) berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.

c. *Process Evaluation* (Evaluasi Proses)

Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki. Evaluasi proses dalam model CIPP menunjuk pada “apa” (*what*) kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” (*who*) orang yang ditunjuk sebagai penanggungjawab program, “kapan” (*when*) kegiatan selesai. Dalam model CIPP, evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana (Arikunto dan Jabar, 2009: 47).

Tujuan dan Fungsi Evaluasi Program

Tujuan Evaluasi Program Arikunto dan Jabar (2009:18) mengatakan bahwa tujuan diadakannya evaluasi program adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program.



Ada tujuh elemen yang harus dilakukan menurut Brikerhoff (1986:ix) (dalam Arikunto dan Jabar 2008:18) untuk pelaksanaan evaluasi, yaitu: 1) penentuan fokus yang akan dievaluasi (*focusing the evaluation*), 2) penyusunan desain evaluasi (*designing the evaluation*), 3) pengumpulan informasi (*collecting information*), 4) analisis dan intepretasi informasi (*analyzing and interpreting*), 5) pembuatan laporan (*reporting information*), 6) pengelolaan evaluasi (*managing evaluation*), dan 7) evaluasi untuk evaluasi (*evaluating evaluation*).

Evaluasimeta

Metaevaluasi adalah mengevaluasi suatu evaluasi, lebih spesifik evaluasimeta menilai evaluasi primer (hasil suatu evaluasi) dengan standar evaluasi yang disusun oleh asosiasi profesi atau organisasi evaluasi untuk menentukan apakah evaluasi primer tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan standar evaluasi (Wirawan 2011; 415). Adapun standar evaluasi program menurut *The Joint Committee* adalah sebagai berikut:

1. *Utility standard* (Standar kegunaan)

Pada standar kegunaan akan dibutuhkan seorang evaluator untuk menghadapi perbedaan berbagai macam klien yang berperan dengan hasil evaluasi, untuk memastikan informasi yang dibutuhkan dan untuk melaporkan informasi yang relevan terhadap klien secara jelas menyeluruh dan tepat waktu. Standar Utilitas ini untuk memastikan bahwa evaluasi menyajikan informasi yang sesuai dengan keperluan pemakai.

2. *Feasibility Standard* (Standar Kelayakan)

Berfokus pada kelayakan dan realisasi bahwa prosedur evaluasi efektif secara biaya dan dapat diterapkan. Standar evaluasi ini memerlukan rencana evaluasi yang dapat diterapkan dalam suatu kondisi sulit sesuai nilai penelitian terhadap praktik. Hal ini memerlukan evaluasi yang realistis, bijaksana, cerdas, dan hemat. Standar kelayakan diperlukan untuk meyakinkan bahwa evaluasi berlangsung realistis, cermat, diplomatis dan hemat.

3. *Proprierty Standard* (Standar Kepatuhan)

Pada tahap ini menggambarkan kenyataan bahwa evaluasi dapat mempengaruhi banyak orang dalam banyak hal. Standar kesesuaian ini memastikan bahwa hak seseorang yang terlibat dalam evaluasi dilindungi, sehingga evaluasi dapat berjalan secara legal, etis, dan dengan mempertimbangkan keselamatan terhadap keterlibatan serta efek evaluasi.

4. *Accuracy Standard* (Standar Akurasi/Ketelitian)

Pada standar ini memerlukan suatu hasil kesimpulan informasi tepat dengan teknik yang memadai dan logika meyakinkan terhadap data. Deskripsi dari analisis data tepat dalam memberikan informasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai bidang tertentu, baik berupa keadaan, permasalahan, sikap, pendapat kondisi, prosedur atau sistem secara faktual dan cermat

Untuk menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka peneliti diharapkan dapat melihat fenomena-fenomena yang ada, yakni tentang evaluasi program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk melihat sejauh mana program ini dapat dicapai.

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan instrumen pengumpul data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa lembar *checklist*, kuesioner (angket terbuka/tertutup), pedoman wawancara, kamera untuk dokumentasi, dan lainnya. Pengujian keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif karena data hasil penelitian harus valid, kredibel dan objektif. Pada penelitian ini, pengujian keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Teknik

triangulasi menurut Moleong (2011:330) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu. Tujuan umum dilakukan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset. Dengan demikian, triangulasi memiliki arti penting dalam menjembatani dikotomi riset kualitatif. Pengumpulan data triangulasi melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Program GISA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Sibolga

Evaluasi program adalah pengumpulan informasi yang sistematis mengenai kegiatan, karakteristik dan hasil program untuk membuat penilaian (evaluasi) mengenai suatu program serta dapat menentukan keberlanjutan suatu program tersebut. Evaluasi program GISA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga ini perlu dilakukan untuk mengetahui apa kekurangan dari pelaksanaan program tersebut dan dampaknya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemerintahan Kota Sibolga dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam memperbaiki ataupun memberikan solusi jika mengimplementasikan program ini terjadi kesalahan-kesalahan dalam penerapan tujuannya.

Context Evaluation

Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program. Aspek yang dikembangkan meliputi merencanakan keputusan, kebutuhan yang akan dicapai dan tujuan program. Merencanakan keputusan dalam hal ini adalah pihak pemerintahan kota sudah merencanakan langkah awal untuk program ini. Untuk itu dalam *context* evaluasi ini yang utama adalah mengetahui manfaat, kebutuhan yang dapat dipenuhi dan tujuan GISA.

Merencanakan Kegiatan

Aspek yang akan dilihat dari dimensi ini adalah merencanakan keputusan dengan hasil temuan yaitu adanya *launching* GISA kepada masyarakat Kota Sibolga yang bertempat di Rusunawa daerah kawasan rumah warga. Masih ada masyarakat yang tidak mengikuti sosialisasi sehingga masyarakat belum sadar akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan ini. Maka dari itu perlu dilakukannya sosialisasi terkait program GISA ini.

Menentukan Kebutuhan

Pada evaluasi konteks kebutuhan ini juga melihat dari terpenuhinya kebutuhan dokumen kependudukan masyarakat. Evaluasi konteks yang dilihat dari segi kebutuhan evaluasi GISA adalah masyarakat Kota Sibolga masih banyak yang belum memiliki kelengkapan dokumen-dokumen kependudukan sejak lahir.

Tujuan Program

Tujuan program ini berguna untuk menilai suatu keputusan, membantu mengembangkan manfaat suatu program dan membantu pengembangan kebijakan dan program. Tujuan program ini untuk sadar kepemilikan dokumen kependudukan, sadar pemukhtahiran data, sadar pemanfaatan data, serta sadar melayani masyarakat. Hasil evaluasimeta yang peneliti lakukan yaitu, standar kegunaan (*utility standard*) mendapatkan skor sebesar 27 atau 96%, standar kelayakan (*feasibility standards*) mendapatkan skor sebesar 11 atau 92%, untuk standar Kepatuhan (*propierty standards*) mendapatkan skor sebesar 30 atau 93%. untuk standar ketelitian (*accuracy standards*) mendapatkan skor sebesar 45 atau 93%.

Input Evaluation

Evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif yang diambil, rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Komponen evaluasi masukan meliputi: sumber daya manusia, sarana dan peralatan pendukung, dana atau anggaran dan aturan yang diperlukan.



Sumber Daya Manusia

Evaluasi input yang dilakukan adalah bahwa pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil masih kurang dalam mengimplementasikan kegiatan sosialisasi untuk tetap meningkatkan kesadaran kepemilikan dokumen kependudukan, pemanfaatan data, pemukhtahiran data dan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya launching GISA di Kota Sibolga bertepatan dengan adanya pandemi covid-19. untuk kegiatan sosialisasi selanjutnya tidak dilaksanakan karena terkendala pandemi covid-19.

Sarana dan Peralatan Pendukung

Sarana dan peralatan pendukung yang digunakan berguna untuk mempercepat proses kerja sesuai dengan hasil yang direncanakan. Sarana dan peralatan pendukung dapat dikatakan baik ketika mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu menghemat waktu. Evaluasi input yang telah dilakukan pada segi sarana dan alat pendukung ditemukan bahwa alat yang digunakan kurang memadai membuat masyarakat yang dilayani dalam pengurusan kepemilikan dokumen kependudukan harus menunggu beberapa hari setelah pengurusan syarat yang ditentukan.

Dana dan Anggaran

Dana atau anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dalam pemenuhan kegiatan dalam sebuah organisasi. Anggaran ini dibuat sebagai pelaksanaan suatu kegiatan dan sebagai perencanaan agar kegiatan suatu organisasi lebih matang dan terarah sesuai dengan tujuan dari suatu organisasi. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat dikemukakan bahwa anggaran terkait program GISA ini sudah ditentukan. Artinya bahwa anggaran ini sudah cukup dan apa adanya dengan memanfaatkan alat dan prasarana lainnya secukupnya yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga. Evaluasi input pada segi anggaran dan dana dapat membuktikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ditentukan. Di satu sisi anggaran dan dana ini bisa saja dikatakan kurang optimal dengan melihat alat dan pendukung lainnya yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga kurang memadai. Hal ini perlu diperhatikan lagi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal.

Aturan yang Diperlukan

Aturan yang digunakan untuk melaksanakan program GISA ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Tujuannya untuk menciptakan ekosistem sadar administrasi kependudukan pada masyarakat yang tertib serta pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan daya saing. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat dikemukakan bahwa GISA adalah gerakan Indonesia sadar administrasi kependudukan yang berasal dari Instruksi Kementerian Dalam Negeri. Program ini didasari dari UU No. 24 Tahun 2013. Program ini mendorong adanya budaya baru dalam tertib kepemilikan administrasi. Evaluasi input terhadap aturan yang diperlukan harus jelas sehingga tujuan, program dan targetan yang dimaksud sudah ditentukan atau dirumuskan terlebih dahulu. Aturan terkait program GISA ini sudah ada dengan regulasi yang jelas. Untuk melihat standar evaluasi dari evaluasimeta yaitu standar kegunaan (*utility standards*) mendapatkan skor sebesar 27 atau 96%, standar kelayakan (*feasibility standards*) mendapatkan skor sebesar 11 atau 92%, standar kepatuhan (*propierty standards*) mendapatkan skor sebesar 30 atau 93%, standar ketelitian (*accuracy standards*) mendapatkan skor sebesar 45 atau 93%. Kesimpulan hasil akhir dari evaluasimeta mendapatkan skor sebesar 113 atau 94%, ini menunjukkan kategori terbaik dari standar evaluasi. berdasarkan hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa sumber daya manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga belum dimanfaatkan secara maksimal dengan adanya penambahan pegawai.

Process Evaluation

Pada dimensi ini bahwa evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi

untuk keputusan program dan sebagai arsip prosedur untuk menyediakan informasi dalam pengambilan keputusan. Untuk itu peneliti melihat beberapa aspek dalam evaluasi Program GISA di Kota Sibolga yaitu: kegiatan dalam program dan jadwal kegiatan.

Kegiatan dalam Program

Kegiatan dalam program ini maksudnya adalah kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk mengimplementasikan program ini. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan mobilisasi ke setiap kelurahan serta mendata masalah atau dokumen kependudukan mana yang tidak terpenuhi dan apa kendalanya. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat dikemukakan bahwa sosialisasi dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga masih belum tersampaikan kepada masyarakat secara menyeluruh. Ini dibuktikan dari hasil wawancara di atas bahwa masih ada masyarakat yang tidak mengikuti sosialisasi terkait arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Hal ini memungkinkan kurangnya kegiatan sosialisasi lanjutan dan himbuan kepada masyarakat. Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi terkait program untuk pengambilan keputusan.

Jadwal Kegiatan

Untuk jadwal kegiatan pada program GISA ini ketika awal mula *launching*, program GISA tetap dilaksanakan dengan memberi contoh pelaksanaan. Untuk jadwal kegiatan ini selalu dilaksanakan karena ini adalah program pemerintahan pusat. Untuk melihat hasil evaluasi meta pada dimensi process yaitu standar kegunaan (*utility standards*) mendapatkan skor sebesar 27 atau 96%, standar kelayakan (*feasibility standards*) mendapatkan skor sebesar 11 atau 92%, standar kepatuhan (*property standards*) mendapatkan skor sebesar 30 atau 93%, standar ketelitian (*accuracy standards*) mendapatkan skor sebesar 45 atau 93%. Kesimpulan hasil akhir dari evaluasi meta yang dilakukan mendapatkan skor sebesar 113 atau 94% sehingga dapat dikategorikan standar evaluasi terbaik. Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan peneliti dapat dikemukakan bahwa kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan belum terlaksana dengan maksimal karena masih ada masyarakat yang tidak mengetahui program GISA tentang arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Ini juga didasari dari jadwal kegiatan yang tidak terjadwal dalam pelaksanaan program GISA. Ketika pandemi covid-19 segala kegiatan untuk pelaksanaan program ini sementara diberhentikan. Akan tetapi pelayanan secara regular tetap dijalankan.

Product Evaluation

Evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian/keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap inilah dapat menentukan apakah program ini dapat dilanjutkan atau tidak. Pada dimensi ini akan membahas beberapa aspek yaitu: *impact evaluation* (evaluasi pengaruh), *effectiveness evaluation* (evaluasi keefektifan), *sustainability evaluation* (evaluasi keberlanjutan) dan *transportability evaluation* (evaluasi transformasi).

Impact Evaluation (Evaluasi Pengaruh)

Evaluasi pengaruh adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari *output* kebijakan. Usaha yang dilakukan untuk menjalankan empat program GISA adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai mobilisasi informasi terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Kegiatan sosialisasi terealisasi sekali sebelum pandemi covid-19 dengan menghasilkan dampak kepemilikan dokumen kartu keluarga yaitu pada tahun 2019 yang belum memiliki kartu keluarga sebanyak 1,76% dan pada tahun 2020 yang belum memiliki kartu keluarga sebanyak 1,43%. Artinya ada peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan sebanyak 0,33% dari tahun 2019 sampai pada tahun 2020 (Sumber data kependudukan disdukcapil 2019 dan 2020). Evaluasi produk yang dilakukan dapat dikemukakan bahwa ada keefektifan program ini untuk tetap dilaksanakan secara berkelanjutan, hal ini dikarenakan adanya kenaikan kepemilikan dokumen kependudukan pada kartu keluarga.



Efectiveness Evaluation (Evaluasi Keefektifan)

Evaluasi efektivitas merupakan salah satu tipe evaluasi kebijakan yang menilai apakah hasil dan dampak suatu program kebijakan sesuai yang diharapkan, apakah tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud, dan apakah dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan (Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, 2002:135). Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat dikemukakan bahwa keefektifan program ini dapat dikatakan efektif jika dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan. Usaha yang dilakukan untuk menjalankan empat program GISA adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai mobilisasi informasi terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Kegiatan sosialisasi terealisasi sekali sebelum pandemi covid-19 dengan menghasilkan dampak kepemilikan dokumen kartu keluarga yaitu pada tahun 2019 yang belum memiliki kartu keluarga sebanyak 1,76% dan pada tahun 2020 yang belum memiliki kartu keluarga sebanyak 1,43%. Artinya ada peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan sebanyak 0.33% dari tahun 2019 sampai pada tahun 2020 (Sumber data kependudukan disdukcapil 2019 dan 2020). Evaluasi produk yang dilakukan dapat dikemukakan bahwa ada keefektifan program ini untuk tetap dilaksanakan secara berkelanjutan, hal ini dikarenakan adanya kenaikan kepemilikan dokumen kependudukan pada kartu keluarga.

Sustainability Evaluation (Evaluasi Keberlanjutan)

Evaluasi keberlanjutan pada program GISA ini dapat dilihat dengan bagaimana mempertahankan fungsi dari suatu program yang telah diatur. Salah satu yang menjadi faktor menentukan keberlanjutan program adalah karena adanya kebutuhan masyarakat yang akan dipenuhi, sehingga membuat program ini berlanjut. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat dikemukakan bahwa evaluasi keberlanjutan dari program GISA tetap dilanjutkan karena masih mempertahankan fungsi yang diatur sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan product evaluasi dapat dikemukakan bahwa pada dimensi ini dapat ditemukan peningkatan/ pengaruh danaya program GISA ini. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka kepemilikan KIA di Kecamatan Sibolga Selatan sebanyak 397 dari 11.063 dari jumlah anak di kecamatan tersebut. (Sumber: data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga pada tahun 2020)

Transportability Evaluation (Evaluasi Transformasi)

Evaluasi transformasi merupakan wadah yang dapat menentukan keberhasilan suatu program. Transformasi yang dapat diibaratkan mampu mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Begitupula dengan program GISA ini sebagai bahan dasar dari pemenuhan pentingnya administrasi kependudukan dan ada tahapan selanjutnya mengubah semua dokumen menjadi *go-digital*, yang bertujuan untuk mempermudah dan mempersingkat administrasi. Sehingga, masyarakat tidak lagi membawa berkas-berkas dalam pemenuhan syarat-syarat administrasi. Untuk melihat hasil evaluasimeta pada dimensi *product* yaitu standar kegunaan (*utility standards*) mendapatkan skor sebesar 27 atau 96%, standar kelayakan (*feasibility standards*) mendapatkan skor sebesar 11 atau 92%, standards kepatuhan (*propierty standards*) mendapatkan skor sebesar 30 atau 93%, standar ketelitian (*accuracy standards*) mendapatkan skor sebesar 45 atau 93%. Kesimpulan dari hasil evaluasimeta mendapatkan skor 113 atau 94% dapat dikategorikan standar evaluasi terbaik.

Triangulasi Pembahasan Penelitian dengan Hasil Evaluasimeta

Hasil evaluasi meta yang peneliti lakukan saat pra penelitian menunjukkan bahwa hasil yang didapatkan adalah Terbaik. Penjelasannya yaitu untuk Utility Standard mendapatkan skor sebesar 28 atau 96%, untuk Feasibility Standard mendapatkan skor sebesar 11 atau 92%, untuk Propriety Standard mendapatkan skor sebesar 30 atau 93%, dan untuk Accuracy Standard mendapatkan skor sebesar 45 atau 93%. Kesimpulan skor yang peneliti dapatkan saat menggunakan standar Evaluasi Meta yaitu sebesar 114 atau 95%. Hal ini menunjukkan bahwa program yang ingin diteliti dengan pendekatan evaluasi meta dapat dilakukan, sehingga hal ini mendukung peneliti untuk mengkaji lebih dalam terhadap Evaluasi Program GISA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian evaluasi program GISA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga yang menggunakan teori dari Daniel Stufflebeam dengan menggunakan model evaluasi *CIPP*

(*Context, Input, Process, Product*) yang telah dipaparkan di pembahasan, dapat memberikan informasi bahwa dalam evaluasi program GISA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga masih belum optimal dan masih dalam proses pencapaian tujuan. Pengamatan peneliti menunjukkan dari segi konteks evaluasi adalah masih ada masyarakat yang tidak mengikuti sosialisasi sehingga masih ada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

Pada evaluasi *input* menunjukkan bahwa sumber daya manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga belum dimanfaatkan secara maksimal dengan adanya penambahan pegawai. Sarana dan prasarana yang adapun kurang memadai dan ini perlu ditingkatkan lagi dari standarisasi alat yang diperlukan. Untuk itu, perlu dimanfaatkan dana dan anggaran yang digunakan agar proses pembuatan dokumen kependudukan selesai dengan efektif dan efisien. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang mencakup pemenuhan terlaksananya program GISA ini sudah ada aturan/regulasi yang jelas. Oleh karena itu implementor program GISA ini tidak ada hambatan/halangan untuk tidak mengimplementasikan program ini.

Pada evaluasi *process* dapat dikemukakan bahwa kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan belum terlaksana dengan maksimal karena masih ada masyarakat yang tidak mengetahui program GISA tentang arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Ini juga didasari dari jadwal kegiatan yang tidak terjadwal dalam pelaksanaan program GISA. Ketika pandemi covid-19 segala kegiatan untuk pelaksanaan program ini sementara diberhentikan. Akan tetapi pelayanan secara regular tetap dijalankan.

Pada evaluasi *product* menunjukkan bahwa belum ada terciptanya minimal satu kecamatan sebagai kecamatan sadar administrasi kependudukan. Ini juga dapat dilihat dari evaluasi konteks bahwasanya masih ada masyarakat yang belum paham terkait arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Untuk itu pengaruh evaluasi ini belum dapat tersampaikan kepada masyarakat secara menyeluruh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab IV, maka kesimpulan akhir penelitian mengenai Evaluasi Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga belum terpenuhi dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan evaluasi program GISA di Kota Sibolga. Kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pada dimensi *context* evaluasi meliputi, merencanakan kegiatan, menentukan kebutuhan, tujuan program dapat ditemukan masih ada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya/*utility* kepemilikan dokumen kependudukan. Untuk itu kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakatpun tidak terpenuhi dengan tertib. Ini juga akan berdampak pada tujuan program yang belum terlaksana untuk menciptakan minimal satu kelurahan sebagai kelurahan yang sadar administrasi kependudukan.
2. Dimensi *Input* meliputi, sumber daya manusia, sarana dan peralatan pendukung, dana dan anggaran, dan aturan yang diperlukan. Pada dimensi ini dapat dikategorikan kurang baik, di mana sarana dan prasarana di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Sibolga masih kurang optimal. Ini dikhawatirkan terjadi gagal input data jika masyarakat mengurus dokumen kependudukan dalam skala besar. Hal ini dikarenakan perangkat yang kurang *update* sehingga pelaksana teknis pembentukan dokumen ini sedikit kendala.
3. Pada evaluasi *process* meliputi kegiatan dalam program dan jadwal kegiatan. Pada dimensi ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan yang telah dilakukan belum terlaksana dengan maksimal karena masih ada masyarakat yang tidak mengetahui program GISA tentang arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Ini juga didasari dari jadwal kegiatan yang tidak terjadwal dalam pelaksanaan program GISA. Ketika pandemi covid-19 segala kegiatan untuk pelaksanaan program ini sementara diberhentikan.



4. Pada evaluasi *product* meliputi *impact evaluation* (evaluasi pengaruh), *effectiveness evaluation* (evaluasi keefektifan), *sustainability evaluation* (evaluasi keberlanjutan) dan *transportability evaluation* (evaluasi transformasi). Pada dimensi ini dilihat adalah hasil dari produk evaluasi yaitu keberlanjutan program GISA dan adanya rencana perubahan bahan mentah menjadi bahan jadi yaitu administrasi kependudukan berbentuk digital.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Sibolga, peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan referensi untuk mengoptimalkan serta menajadikan masukan pelaksanaan program GISA Kota Sibolga. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga perlu terus melakukan jemput bola terkait program untuk mewujudkan tujuan program ini dengan minimal menciptakan satu kelurahan yang dapat disebut sebagai satu kelurahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus meningkatkan kualitas pegawai serta sarana dan prasarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Sibolga. Hal ini sangat penting dalam membantu meningkatkan kepemilikan dan mempermudah serta mempercepat pekerjaan yang berkaitan untuk dokumen kependudukan.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu untuk melakukan penjadwalan terkait program secara sistematis dengan menambah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan program GISA, agar masyarakat secara merata mengetahui adanya program GISA ini dan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan untuk urusan administratif.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap meningkatkan keefektivitasan dan keberlanjutan dari program GISA ini, karena program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam mengurus administrasi sehari-hari. Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tetap melanjutkan program GISA dan memperbaiki pemenuhan administrasi kependudukan dalam bentuk digital.

DAFTAR PUSTAKA

- 2017 *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- 2011. *Metode Penelitian Administrasi dengan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwa
- Akbar, Firyal Muhammad dan Widya Kurniati, 2018. *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Ideas Publishing.
- Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cipi Safruddin Abdul. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Instruksi menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ. Tentang *Gerakan Indonesia Sadar Administrasi kependudukan*
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Munthe, Ashiong P. 2015. Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat. *Scholaria, Fakultas Ilmu Pendidikan*. Vol. 5 No. 2. 1-14.
- Mustari, Nuryanti. 2013. *Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Membumi Publishing.
- Roswati. 2008. *Evaluasi Program /Proyek (Pengertian, Fungsi, Jenis dan Format Usulan)*. *Jurnal Pendidikan Penabur*. No.11.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang *Administrasi Kependudukan*.
- Widoyoko, Eko Putro. 2013. *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Wirawan. 2011. *Evaluasi: Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.